KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 21 Agustus 2019

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman 15)	Rabu, 21 Agustus 2019	Pembangunan Diarahkan ke Pelestarian Alam	Pembangunan di semua provinsi di Kalimantan diarahkan ke strategi rendah karbon. Tujuannya untuk menjaga daya dukung lingkungan serta mempertahankan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia.
2	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Rabu, 21 Agustus 2019	Tol Serang—Panimbang Molor	Penyelesaian proyek jalan tol SerangPanimbang seksi I bakal molor. Proyek itu pada awalnya ditargetkan selesai akhir 2019. Namun, kini Badan Pengatur Jalan Tol menargetkan tuntas pada pertengahan 2020.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Rabu, 21 Agustus 2019	Berita Foto	Permukiman penduduk terkepung air laut akibat abrasi di Desa Sriwulan yang berbatasan dengan Kota Semarang, di Sayung, Demak, Jawa Tengah.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Rabu, 21 Agustus 2019	Waskita Siap Jual Saham di Tol Becakayu	PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyiapkan rencana pelepasan saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, operator jalan tol Bekasi—Cawang—Kampung Melayu.
5	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Rabu, 21 Agustus 2019	PP Bakal Garap SPAM Terbesar di Indonesia	PT PP (Persero) Tbk. bakal menggarap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 10.000 liter per detik (lpd).
6	Bisnis Indonesia (Halaman 22)	Rabu, 21 Agustus 2019	IAID Capai Kesepakatan US$822 Miliar	Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan bisnis senilai US$822 miliar dengan negara-negara Afrika dalam forum Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID).
7	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Rabu, 21 Agustus 2019	Permintaan TOD Terkerek Ganjil Genap	Hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum atau massal, transit oriented development (TOD) kian prospektif, setelah semakin nyamannya transportasi publik dan munculnya kebijakan yang membatasi kendaraan pribadi.
8	Media Indonesia (Halaman 2)	Rabu, 21 Agustus 2019	Berita Foto	Presiden Joko Widodo dengan didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja berfoto bersama perwakilan delegasi negara-negara Afrika saat menghadiri Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 di Bali, kemarin.
9	Media Indonesia (Halaman 3)	Rabu, 21 Agustus 2019	Berita Foto	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan paparan di acara bincang bersama milenial Youth Talks di Jakarta, kemarin.
10	Media Indonesia (Halaman 11)	Rabu, 21 Agustus 2019	Berita Foto	Foto udara permukiman penduduk terkepung air laut akibat abrasi di Desa Sriwulan yang berbatasan dengan Kota Semarang, di Sayung, Demak, Jawa Tengah, kemarin.

Judul	**Pembangunan Diarahkan ke Pelestarian Alam**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Pembangunan di semua provinsi di Kalimantan diarahkan ke strategi rendah karbon. Tujuannya untuk menjaga daya dukung lingkungan serta mempertahankan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia.		

LINGKUNGAN

Pembangunan Diarahkan ke Pelestarian Alam

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pembangunan di semua provinsi di Kalimantan diarahkan ke strategi rendah karbon. Tujuannya untuk menjaga daya dukung lingkungan serta mempertahankan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia.

Hal itu mengemuka dalam Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Wilayah Kalimantan, Selasa (20/8/2019). Acara dihadiri semua pemimpin provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi se-Kalimantan. Dalam pertemuan yang berlangsung sampai Rabu (21/8) itu dibahas arah pembangunan nasional hingga 2024.

Dalam acara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat, Kalimantan merupakan salah satu pulau dengan laju deforestasi tertinggi sejak 2000.

Saat ini tutupan lahan tinggal 58,07 persen. Pada 2024 diperkirakan terjadi penurunan tutupan lahan hingga 10,88 persen. Jika tidak ada intervensi kebijakan dalam arah pembangunan, tutupan lahan hutan nasional akan turun hingga 44,51 persen pada 2045.

Menurut Bambang, penurunan tutupan lahan terjadi akibat kompetisi lahan pertanian dan perkebunan. Alih fungsi hutan gambut pada 2000-2015 di Kalimantan lebih dari 15 persen. Sejak 2015, pemerintah menetapkan moratorium alih fungsi lahan gambut.

"Kalimantan memiliki titik panas terbanyak serta wilayah kebakaran hutan dan lahan terluas di Indonesia. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan, harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalimantan," tutur Bambang.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata mengatakan, ada lima perencanaan pembangunan rendah karbon untuk Kalimantan. Salah satunya, rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan tutupan hutan dan konservasi sumber daya air.

"Pengembangan energi baru terbarukan penting di Kalimantan. Jangan bergantung pada batubara karena bisa habis. Energi pengganti rendah karbon harus disiapkan dalam lima tahun ke depan," ujarnya.

Pengembangan energi baru terbarukan penting di Kalimantan. Jangan bergantung pada batubara karena bisa habis.

Rudy S Prawiradinata

Strategi lain adalah penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Saat ini, masih banyak tambang ilegal di Kalimantan.

Pertahankan hutan

Bappenas mendorong setiap provinsi di Kalimantan untuk mempertahankan tutupan lahan. Di Kalimantan Utara, hutan perlu dipertahankan minimal 5,7 juta hektar. Habitat spesies kunci perlu dipertahankan setidaknya 76.000 hektar dan hutan di lahan gambut minimal 26.000 hektar.

Semua gubernur sepakat pembangunan tetap mempertahankan kawasan hutan di Kalimantan. Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambire menyatakan, hutan Kalimantan adalah aset berharga dunia.

Hal itu sejalan dengan kesepakatan Jantung Borneo (Heart of Borneo), sebuah inisiatif dari tiga negara, Brunei, Indonesia, dan Malaysia, untuk mengelola kawasan hutan tropis seluas 23 juta hektar.

Catatan Heart of Borneo, hutan Kalimantan yang tersisa tidak lebih dari 60 persen. Communications Manager WWF Heart of Borneo Programme Regina Nikijuluw mengatakan, masyarakat adat berperan penting untuk mewujudkan salah satu tujuan Jantung Borneo, yakni pembangunan berkelanjutan agar hutan Borneo dikelola dengan bijak oleh siapa pun (*Kompas*, 2/7/2019).

Untuk mewujudkan, lanjut Bambang, arah pembangunan setiap provinsi di Kalimantan harus bersinergi untuk hilirisasi industri sumber daya alam. Untuk mencegah ketergantungan pada penawaran global, sumber daya alam perlu diolah dari hulu sampai hilir, jangan langsung diekspor. Hal itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena terbukanya lapangan kerja. (CIP)

Judul	**Tol Serang—Panimbang Molor**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Penyelesaian proyek jalan tol SerangPanimbang seksi I bakal molor. Proyek itu pada awalnya ditargetkan selesai akhir 2019. Namun, kini Badan Pengatur Jalan Tol menargetkan tuntas pada pertengahan 2020.		

PROYEK JALAN

Tol Serang–Panimbang Molor

Bisnis, JAKARTA — Penyelesaian proyek jalan tol Serang-Panimbang seksi I bakal molor. Proyek itu pada awalnya ditargetkan selesai akhir 2019. Namun, kini Badan Pengatur Jalan Tol menargetkan tuntas pada pertengahan 2020.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengakui bahwa saat ini proyek tol Serang-Panimbang akan mundur dari target awal.

"Yang porsi BUJT [Badan Usaha jalan Tol], posisi sekarang seksi I Serang-Rangkasbitung progres 60,6% dan yang Rangkasbitung-Cileles belum ada progres konstruksi. Total progres porsi BUJT 36,42%, seksi I Serang Rangkasbitung *update timeline* bulan Mei 2020," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (19/8).

Mundurnya penyelesaian seksi I tol tersebut juga membuat proyek seksi berikutnya juga molor. Seksi II Rangkasbitung-Cileles kini dijadwalkan baru mulai konstruksi pada Juni 2020 dan selesai pada Juli 2022, atau selesai dalam 24 bulan. Itu pun bergantung dengan proses pembebasan lahan dan persetujuan penambahan penetapan lokasi (Penlok) baru.

Adapun, porsi pemerintah yakni seksi III Cileles-Panimbang, menurut Danang, masih dalam tahap persiapan pendanaan konstruksi. "Masih dalam tahap persiapan, termasuk ketersediaan pendanaan konstruksinya. Perlu ada upaya percepatan dan inovasi supaya semua seksi bisa selesai sesuai target."

Sebagaimana diketahui, pinjaman dari China merupakan sumber baru dalam pembiayaan jalan tol Serang - Panimbang porsi pemerintah. Sebelumnya, Kementerian PUPR berniat menggunakan anggaran negara dengan skema ketersediaan layanan atau *availibility payment* (AP).

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya sebelumnya menuturkan bahwa saat ini realisasi progres dari pembangunan tol Serang - Panimbang 29,20%.

Menurutnya, proyek tol ini sempat tersangkut dengan beberapa permasalahan di lahan, tetapi saat ini sejumlah lahan sudah dibebaskan dan konstruksinya tetap berjalan

Pembangunan jalan tol Serang—Panimbang sepanjang 83,70 kilometer dibagi menjadi tiga seksi yakni seksi 1 (Serang—Rangkas Bitung) sepanjang 26,50 kilometer, seksi 2 (Rangkas Bitung—Bojong) sepanjang 33 kilometer, dan seksi 3 (Bojong—Panimbang) sepanjang 24,40 kilometer.

Dalam proyek yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pemerintah memberi dukungan infrastruktur dengan membangun tol pada seksi 1 sepanjang 33 km, sedangkan 50,67 km sisanya dikerjakan oleh badan usaha jalan tol. *(Krizia Putri K)*

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Permukiman penduduk terkepung air laut akibat abrasi di Desa Sriwulan yang berbatasan dengan Kota Semarang, di Sayung, Demak, Jawa Tengah.		

▸ RENCANA TOL SEMARANG-DEMAK

Antara/Aji Styawan

Foto udara permukiman penduduk terkepung air laut akibat abrasi di Desa Sriwulan yang berbatasan dengan Kota Semarang, di Sayung, Demak, Jawa Tengah, Selasa (20/8). Kementerian PUPR menargetkan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak sepanjang 27 kilometer yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut senilai Rp15,5 triliun akan dimulai pada akhir 2019, dan ditargetkan selesai pada 2021, guna menanggulangi kemacetan serta abrasi di pesisir utara Semarang-Demak.

Judul	**Waskita Siap Jual Saham di Tol Becakayu**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyiapkan rencana pelepasan saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, operator jalan tol Bekasi— Cawang—Kampung Melayu.		

DIVESTASI USAHA

Waskita Siap Jual Saham di Tol Becakayu

Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyiapkan rencana pelepasan saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, operator jalan tol Bekasi—Cawang—Kampung Melayu. Divestasi ini merupakan lanjutan dari serangkaian rencana pelepasan saham perusahaan tol yang berlangsung sejak 2018.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan mengatakan, divestasi saham KKDM diharapkan bisa tuntas pada tahun depan. Hingga akhir 2019, Waskita Karya tengah dalam proses divestasi di lima ruas tol. Waskita Karya belum bisa memperkirakan dana segar yang bisa diraup dari penjualan saham KKDM.

"Becakayu targetnya tahun depan, tetapi kami proses dari tahun ini. Kita pakai RDPT [reksa dana penempatan terbatas] tapi langsung ke direct investor," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/8).

Sebagaimana diketahui, Waskita Karya melalui anak usaha Waskita Toll Road memiliki 99,56% saham KKDM. Saat ini, jalan tol sepanjang 16,04 kilometer itu sudah beroperasi separuhnya, yakni seksi 1A dan 1B (Cipinang—Jaka Sampurna).

Haris mengungkapkan, rencana divestasi saham KKDM direncanakan dengan menggunakan instrumen reksa dana penempatan terbatas (RDPT). Nantinya instrumen tersebut langsung diserap oleh calon investor yang berminat mencaplok saham perseroan di KKDM.

Rencana divestasi saham KKDM direncanakan dengan menggunakan instrumen reksa dana penempatan terbatas (RDPT) yang nantinya langsung diserap oleh calon investor.

Dia menambahkan, perseroan juga tidak akan memiliki opsi membeli kembali atau *buyback* sebagaimana skema yang digunakan pada pelepasan saham PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR).

Pada April 2019, WTR melepas 70% saham WTTR lewat RDPT dan mengantongi keuntungan Rp1,3 triliun. WTTR merupakan entitas induk dari tiga badan usaha jalan tol, yakni PT Semesta Marga Raya, PT Pejagan Pemalang Toll Road, dan PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol.

Saat ini, Waskita Karya juga tengah dalam proses uji tuntas dengan dua calon investor yang berniat mengambil alih saham WTR di lima perusahaan jalan tol. Secara keseluruhan, WTR memiliki saham di 18 ruas tol dengan panjang konsesi 1.015 kilometer. Menurut Haris, perseroan sudah mendapat izin untuk melego kepemilikan saham di sembilan ruas jalan tol.

Sebelumnya Haris mengatakan, satu investor berminat untuk mengambil alih 40% saham WTR di PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono. Kedua perusahaan ini merupakan pengelola jalan tol Solo-Ngawi dan Ngawi Kertosono.

Sementara itu, tiga ruas lain tengah diincar oleh PT Bandha Investasi, perusahaan patungan yang didirikan oleh delapan badan usaha milik negara. Bandha Investasi menggandeng perusahaan keuangan asal Australia, Macquarie untuk menghimpun dana sebesar US$600 juta sebagai modal akuisisi.

Kendati enggan menyebut target perolehan dana dari divestasi saham perusahaan tol, Waskita Karya menilai valuasi 1,5 hingga 2 kali harga buku terbilang wajar untuk ruas jalan tol yang sudah beroperasi. Per Juni 2019, sebelas ruas jalan tol yang konsesinya dimiliki WTR secara mayoritas maupun minoritas sudah beroperasi.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. diketahui memberikan tambahan modal untuk anak usahanya yang bergerak dalam investasi jalan tol, yaitu PT Waskita Toll Road (WTR) sebesar Rp1,19 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, penambahan modal meningkatkan porsi kepemilikan Waskita Karya dari semula 79,88% menjadi 80,56%. Porsi tersebut setara 12,83 juta lembar saham WTR senilai Rp12,83 triliiun.

"Tujuan peningkatan modal disetor dan ditempatkan tersebut akan digunakan oleh WTR untuk memberikan setoran modal dan pinjaman kepada anak perusahaan WTR dalam rangka kebutuhan dana talangan tanah," tulis Corporate Secretary Waskita Karya, Shastia Hadiarti.

WTR juga telah menambah modal pada entitas PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) sebesar Rp18 miliar. WTR memiliki saham sebanyak 423.210 lembar atau 30% dari total saham di perusahaan yang menjadi operator jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi tersebut.

PROYEK IBU KOTA BARU

Sementara itu, terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, PT Waskita Karya (Persero) menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti tender proyek-proyek konstruksinya.

Direktur Operasi II Waskita Karya Bambang Rianto mengatakan perseroan siap mengikuti tender yang dibuka pemerintah maupun partisipasi. Dia menambahkan, Waskita Karya bakal menunggu kepastian regulasi sebelum berpartisipasi dalam proyek konstruksi di ibu kota negara yang baru.

Rencana pemindahan ibu kota negara memang kian terang setelah Presiden Joko Widodo meminta restu Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2019. Saat itu, presiden menyebut ibu kota negara hendak dialihkan ke Kalimantan. Namun, lokasi calon ibu kota negara yang baru belum diumumkan.

"Sejauh ini belum ada pembicaraan [terkait pemindahan ibu kota negara], tapi kami pernah menghadiri sosialisasinya di PU [Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat]. Kami pasti berminat, tentu setelah legal standing-nya fix [pasti]," jelasnya di Jakarta, Selasa (20/8).

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota negara sedikitnya membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare dengan asumsi tidak ada perubahan jumlah aparatur sipil negara (ASN). Dengan skenario tersebut, sebanyak 1,5 juta bakal hijrah ke Kalimantan.

Untuk memboyong ASN ke Kalimantan dan membangun infrastruktur dasar, pemerintah sedikitnya membutuhkan dana sebesar Rp250 triliun dari total kebutuhan Rp466 triliun. Bambang menyebut, ada empat sumber pembiayaan, yakni anggaran negara, badan usaha milik negara, kerja sama dengan badan usaha (KPBU), dan swasta.

Judul	**PP Bakal Garap SPAM Terbesar di Indonesia**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	PT PP (Persero) Tbk. bakal menggarap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 10.000 liter per detik (lpd).		

PROYEK AIR MINUM

PP Bakal Garap SPAM Terbesar di Indonesia

Bisnis, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. bakal menggarap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 10.000 liter per detik (lpd). Proyek ini bakal menjadi SPAM dengan kapasitas terbesar di Indonesia yang bisa melayani 2,8 juta penduduk.

Direktur Keuangan PT PP Agus Purbiyanto mengatakan, perseroan tergabung dalam sebuah konsorsium MMVP, terdiri dari Maynillad Water Services Inc., Metropac, PT Varsha Zamindo Lestari, dan anak usaha PTPP, PP Infrastruktur.

Dia menambahkan, konsorsium ini bakal mengolah air dari Bendungan Juanda, Purwakarta menjadi air bersih dan disalurkan ke perusahaan daerah air minum di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Bekasi.

"Ini proyek *unsolicited*, kita *bidding* untuk mendapatkan konsesi air dari [Bendungan] Jatiluhur. Jadi kami [konsorsium] memproduksi air baku, dijual ke PDAM," jelasnya menjawab *Bisnis*, Selasa (20/8).

Pada pekan lalu, konsorsium MMVP dan Perum Jasa Tirta II selaku pengelola Bendungan Juanda telah meneken kesepakatan terkait studi ketersediaan air baku yang menjadi bagian dari studi kelayakan. Proyek SPAM Djuanda mencakup bakal menggunakan skema kontrak berbasis kinerja dengan lingkup untuk lingkup jaringan perpipaan dan pelayanan pelanggan.

Direktur Pengembangan Bisnis PTPP Aprindy menuturkan, kapasitas tampung Bendungan Juanda amat banyak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk proyek SPAM skala besar. Berdasarkan Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II 2017, potensi air yang bisa dikelola mencapai 13 miliar meter kubik per tahun dan saat ini baru dimanfaatkan sebanyak 8 miliar meter kubik.

Dia menambahkan, perseroan dan anggota konsorsium kini tengah merundingkan besaran partisipasi masing-masing anggota di konsorsium.

Menurut Aprindy, pihaknya juga melakukan studi terkait kapasitas SPAM yang akan dibangun dan nilai investasi yang dibutuhkan. Bila studi telah rampung, konsorsium akan mengajukan prakarsa badan usaha guna mendapatkan konsesi pengusahaan SPAM.

"Kami berharap tahun depan sudah bisa jalan. SPAM ini akan menjadi *backbone* salah satu anak usaha kami di upstream, yaitu PP Infrastruktur," jelasnya kepada *Bisnis*, Selasa (20/8).

Saat ini, PTPP sedikitnya memiliki lima portofolio SPAM, tersebar di Kampar (Riau), Bekasi (Jawa Barat), Tangerang Selatan (Banten), dan Gresik (Jawa Timur). Dalam dua tahun ke depan, kapasitas SPAM yang akan beroperasi mencapai 7.500 lpd.

Di lain pihak, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II U. Saefudin Noer mengatakan bahwa kesepakatan yang diteken perusahaan dengan konsorsium MMVP pada pekan lalu baru sebatas mengkaji model bisnis, kelayakan usaha, dan kelembagaan usaha. "MoC [memorandum of collaboration] juga termasuk kajian kecukupan dan ketersediaan sumber air," tuturnya, Selasa (20/8). *(Rivki Maulana)*

Judul	**IAID Capai Kesepakatan US$822 Miliar**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 22)		
Resume	Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan bisnis senilai US$822 miliar dengan negara-negara Afrika dalam forum Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID).		

KERJA SAMA INDONESIA-AFRIKA

IAID Capai Kesepakatan US$822 Miliar

Bisnis, MANGUPURA — Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan bisnis senilai US$822 miliar dengan negara-negara Afrika dalam forum Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID).

Yustinus Andri
yustinus.andri@bisnis.com

- **Kesepakatan bisnis tersebut meningkat dari perolehan pada forum yang sama tahun lalu, yang mencapai US$586 juta.**
- **Hambatan secara tarif dan nontarif masih sangat tinggi sehingga sulit untuk memaksimalkan pasar negara-negara di Afrika.**

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kesepakatan bisnis tersebut meningkat dari perolehan pada forum yang sama tahun lalu, yang mencapai US$586 juta. Adapun, kesepakatan bisnis tersebut meliputi kerja sama di bidang infrastruktur, perdagangan dan investasi di berbagai sektor.

"Nilai kesepakatan bisnis ini masih bisa terus bertambah," ujarnya dalam forum IAID di Nusa Dua Bali, Selasa (20/8).

Adapun, kesepakatan bisnis tersebut meliputi kerja sama PT Wijaya Karya Tbk. (Persero) dengan pemerintah Niger untuk pembangunan komplek kepresidenan senilai US$10 juta dan kerangka kesepakatan pembangunan La Tour De Goree Tower antara Wijaya Karya, Indonesia Eximbank dan Pemerintah Senegal senilai US$250 juta.

Selain itu, ada pula kesepakatan pembangunan perumahan rakyat antara pemerintah Wijaya karya dengan Pantai Gading senilai US$200 juta. Perusahaan pelat merah RI tersebut juga menjalin kesepakatan dengan Tanzania di bidang konstruksi senilai US$190 juta.

Selanjutnya, terdapat kesepakatan terkait dengan distribusi farmasi antara Kimia Farma dan Topwide Pharmaceutical asal Nigeria senilai US$2,5 juta. Masih di sektor farmasi, terdapat juga kesepakatan antara PT Bio Farma (Persero) dengan sejumlah perusahaan farmasi di Tanzania dan Nigeria senilai US$7,5 juta. Perjanjian bisnis juga terjadi antara Dexa Group dengan Bahari Pharmacy asal Tanzania sebesar US$1,5 juta.

Di samping itu kesepakatan bisnis juga diperoleh PT Indesso Aroma dengan perusahaan asal Tanzania senilai US$2,5 juta dan PT Energi Mega Persada Tbk. dengan perusahan dari Mozambik senilai US$83 juta. Terakhir, kesepakatan kerja sama pembiayaan antara Indonesia Eximbank dengan Bank Pembangunan Negara-Negara Afrika Tengah (BDEC) senilai US$50 juta.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di forum IAID mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam membangun infrastruktur. Untuk itu dia mengajak negara-negara Afrika untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahan asal Indonesia untuk membangun infrastruktur di Benua Afrika.

BANYAK HAMBATAN

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengatakan, dalam beberapa tahun yang lalu, Afrika menjadi kawasan yang potensial tetapi jarang terjamah oleh pemerintah dan pebisnis Indonesia.

Namun demikian, dia menilai ekspansi berupa ekspor maupun investasi di Afrika masih memiliki tantangan yang sangat besar. Di sektor perdagangan, hambatan secara tarif dan nontarif masih sangat tinggi sehingga sulit untuk memaksimalkan pasar negara-negara di Afrika.

Di sisi lain, menurutnya, beberapa perusahaan Indonesia sulit menjual produk ke Afrika lantaran belum banyaknya lembaga pembiayaan yang mumpuni di benua tersebut. Terkait dengan investasi, beberapa negara masih terbilang belum terlalu stabil dari sisi ekonomi maupun politik, sehingga memiliki risiko yang tergolong besar. "

Selain itu, untuk kerja sama pembangunan proyek di beberapa negara di Afrika, perusahaan Indonesia masih terganjal oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan di negara yang bersangkutan," lanjutnya.

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia dengan negara di Afrika yang mencatatkan defisit pada tahun lalu, membuat pemerintah berusaha keras memaksimalkan potensi yang ada di kawasan tersebut tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, salah satu langkah yang sedang ditempuh RI adalah dengan menjajaki kerja sama dagang dengan Uganda, Somalia, Tanzania, Djibouti dan Mauritius.

"Beberapa negara seperti Tanzania dan Djibouti bahkan sudah sepakat untuk melakukan pendalaman kerja sama dagang. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan *joint feasibility study.*"

Enggar mengatakan, kendati Djibouti memiliki populasi penduduk dan luas wilayah yang relatif kecil, tetapi negara tersebut dapat menjadi hub ekspor RI ke negara-negara lain seperti Ethiopia, Eritrea dan negara lain di Timur Tengah.

PASAR DI SEBERANG SAMUDRA HINDIA

Sejumlah kesepakatan bisnis yang diperoleh Indonesia dengan Afrika diharapkan dapat meningkatkan skala kerja sama bisnis dan perdagangan antara Indonesia dengan benua tersebut.

Terlebih selama ini kedekatan diplomatik antara Indonesia dan Afrika belum berdampak banyak terhadap perekonomian kedua kawasan.

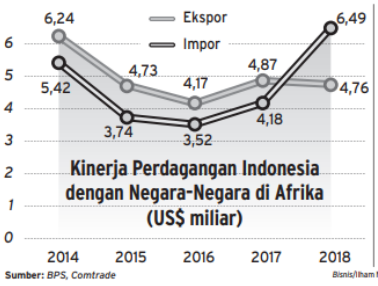

Sumber: *BPS, Comtrade*

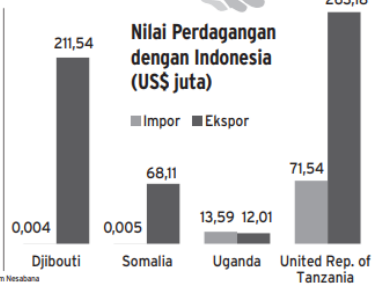

Bisnis/Ilham Nesabana

Judul	**Permintaan TOD Terkerek Ganjil Genap**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum atau massal, transit oriented development (TOD) kian prospektif, setelah semakin nyamannya transportasi publik dan munculnya kebijakan yang membatasi kendaraan pribadi.		

HUNIAN JABOTABEK

Permintaan TOD Terkerek Ganjil Genap

Bisnis/Himawan L. Nugraha

Bisnis, JAKARTA — Hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum atau massal, *transit oriented development* (TOD) kian prospektif, setelah semakin nyamannya transportasi publik dan munculnya kebijakan yang membatasi kendaraan pribadi.

Mutiara Nabila & Putri Z. Salsabila
redaksi@bisnis.com

Perluasan sistem ganjil genap untuk kendaraan roda empat pribadi di 25 ruas wilayah Jakarta juga menjadi stimulus pasar untuk menyerap hunian yang memiliki jarak dekat ke pusat transportasi umum.

"Pembatasan kendaraan roda empat bisa menyebabkan pencari hunian di Jakarta untuk memilih rumah atau apartemen yang dekat dengan sarana transportasi umum baik MRT, *commuterline*, maupun TransJakarta agar tidak mengalami hambatan lalu lintas dalam aktivitasnya sehari-hari," tutur Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan, Selasa (20/8).

Perluasan sistem ganjil genap yang berlaku bagi kendaraan roda empat ini dilakukan karena adanya tersedianya transportasi umum di wilayah tersebut.

Adapun rute Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta berada di koridor Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Jalan MH Thamrin. Sementara untuk beberapa ruas jalan lainnya, telah dilayani oleh jaringan bus TransJakarta dengan jalur khusus yang bisa diakses masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan pasar properti DKI Jakarta yang sempat stagnan dalam satu tahun terakhir. Padahal di sisi pasokan terjadi penurunan, sehingga menstimulasi kenaikan harga di pasar properti Jakarta.

Kenaikan indeks properti di DKI Jakarta didorong oleh kenaikan di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

Berdasarkan Rumah.com Property Index, indeks harga properti di DKI Jakarta berada pada angka 131,1 atau naik 2% (secara kuartalan).

Kenaikan ini jauh di atas rata-rata kenaikan per kuartal sepanjang 2018, sebesar 0,2%. Secara tahunan, kenaikan harga properrti residensial di DKI Jakarta sebesar 4%. Kenaikan secara tahunan ini masih sama dengan tahun lalu.

Ike mengatakan bahwa kenaikan indeks properti di DKI Jakarta didorong oleh kenaikan di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Jakarta Selatan, yang dilintasi MRT, mengalami kenaikan hingga 2%, sementara Jakarta Utara mengalami kenaikan hingga 3%, di antaranya didukung adanya uji coba LRT Kelapa Gading. Jakarta Timur mencatatkan kenaikan terendah secara kuartalan, yakni 0,33%.

Optimisme laku kerasnya hunian TOD juga dirasakan Perum Perumnas. Melalui pameran bertajuk Perumnas Hunian Festival, BUMN itu menargetkan penjualan 300 unit.

"Di sini kami fokus pasarkan produk di Jabodetabek karena 50% dari seluruh kebutuhan rumah di Indonesia terkonsentrasi di Jabodetabek. Lalu untuk menyiasatinya juga kami fokus kembangkan hunian berbasis transportasi [TOD]," kata Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo dalam pembukaan pameran yang berlangsung 20-25 Agustus itu, Selasa (20/8)

Menurutnya, seperti tiga proyek TOD Perumnas, yaitu Mahata di Tanjung Barat, Margonda, dan Serpong memiliki peminat yang luar biasa. Sistem TOD kata Bambang sangat digemari masyarakat karena pertumbuhan masyarakat ke depan akan lebih cenderung memerlukan transportasi.

Sementara itu, penjualan proyek perumahan tapak TOD milik PT Metropolitan Land Tbk (Metland) tumbuh 10% setelah beroperasinyaa stasiun yang mereka bangun di Telaga Murni, Cibitung, Bekasi.

"Peningkatan itu karena pasarnya semakin meluas dengan adanya akses stasiun," ujar Thomas Johannes Angfendy, Direktur Utama Metropolitan Land.

Pihaknya masih tetap mempertahankan harga mulai Rp400 jutaan per unit agar hunian itu tetap terserap pasar. Namun, pihaknya harus mengurangi luas bangunan menjadi 1 kamar.

Sejauh ini tingkat hunian TOD tersebut telah mencapai 80% dengan total lahan pengembangan kawasan Telaga Murni seluas 400 hektare. "Baru kami kembangkan 100 hektare, makanya kami akan mengebut proyek ini," ujarnya.

Selain TOD di Telaga Murni, Cibitung, pihaknya juga akan mengembangkan TOD lain yakni di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, seluas 100 hektare yang terdiri dari perumahan tapak, pusat belanja, hotel bintang empat, ruko, dan fasilitas pelengkap.

Anhar Sudrajat, Wakil Direktur Utama Metropolitan Land, menyebutkan bahwa sebagai tahap awal akan dibangun fasilitas pelengkap yakni hotel yang akan dikelola oleh Horison.

"Kami akan memulai konstruksi dan peletakan batu pertama pada 28 Agustus 2019," ujarnya.

Investasi awal yang disiapkan untuk pembangunan hotel tersebut Rp100 miliar. Hotel ini terdiri dari 150 unit kamar dengan tarif sewa per hari mulai Rp400.000.

TOD LRT

PT Adhi Commuter Property (ACP) juga mengembangjan TOD kereta ringan (LRT) melalui proyek bangunan vertikalnya Royal Sentul Park.

Project Director Royal Sentul Park Nanang Sarifudin Salim mengungkapkan, Royal Sentul Park yang dibangun sejak pertengahan 2017 di area 14,8 hektare akan mencakup 12 menara apartemen, dua menara hotel, satu menara kantor, dan satu menara universitas. Pembangunannya dibagi menjadi lima tahap.

"Dengan tutup atap apartemen tower pertama ini, kami optimistis bisa serah terima unit secara bertahap kepada konsumen pada 2020," ujarnya.

Nanang menjelaskan, kawasan Royal Sentul Park dikembangkan dengan pendekatan konsep TOD. Karenanya, konektivitasnya dengan konsep hijau akan lebih diarahkan kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda.

Dia menuturkan, dengan fasilitas yang lengkap serta kemudahan akses LRT menjadikan Royal Sentul Park memiliki tambahan nilai dan prospek menjanjikan pada masa mendatang. Kehadiran LRT di kawasan Sentul akan berdampak positif dalam segi ekonomi maupun infrastruktur di wilayah mitra DKI Jakarta.

"Selain mengurangi kemacetan, kehadiran LRT tersebut dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi pada transportasi massal. Termasuk menumbuhkan pusat ekonomi baru, sebab adanya konsep TOD di sisi stasiun LRT memberikan dorongan aktivitas ekonomi," terangnya.

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Presiden Joko Widodo dengan didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja berfoto bersama perwakilan delegasi negara-negara Afrika saat menghadiri Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 di Bali, kemarin.		

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMA

KERJA SAMA INDONESIA-AFRIKA: Presiden Joko Widodo dengan didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja berfoto bersama perwakilan delegasi negara-negara Afrika saat menghadiri Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 di Bali, kemarin. Forum internasional yang memetakan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Afrika itu mengangkat tema *Connecting for prosperity*.

RI Siap Bantu

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 3)		
Resume	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan paparan di acara bincang bersama milenial Youth Talks di Jakarta, kemarin.		

MI/ADAM DWI

DISKUSI PEMINDAHAN IBU KOTA : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan paparan di acara bincang bersama milenial Youth Talks di Jakarta, kemarin. Bambang mengatakan salah satu tujuan pemindahan ibu kota karena Jakarta sudah terlalu banyak beban dan demi mengatasi kesenjangan ekonomi.

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Rabu, 21 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 11)		
Resume	Foto udara permukiman penduduk terkepung air laut akibat abrasi di Desa Sriwulan yang berbatasan dengan Kota Semarang, di Sayung, Demak, Jawa Tengah, kemarin.		

ANTARA/AJI STYAWAN

TOL TERINTEGRASI TANGGUL LAUT: Foto udara permukiman penduduk terkepung air laut akibat abrasi di Desa Sriwulan yang berbatasan dengan Kota Semarang, di Sayung, Demak, Jawa Tengah, kemarin. Kementerian PU-Pera menargetkan pembangunan Tol Semarang-Demak sepanjang 27 kilometer yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut bernilai investasi Rp15,5 triliun akan dimulai pada akhir 2019 dan ditargetkan selesai pada 2021, guna menanggulangi kemacetan serta abrasi di pesisir utara Semarang-Demak.